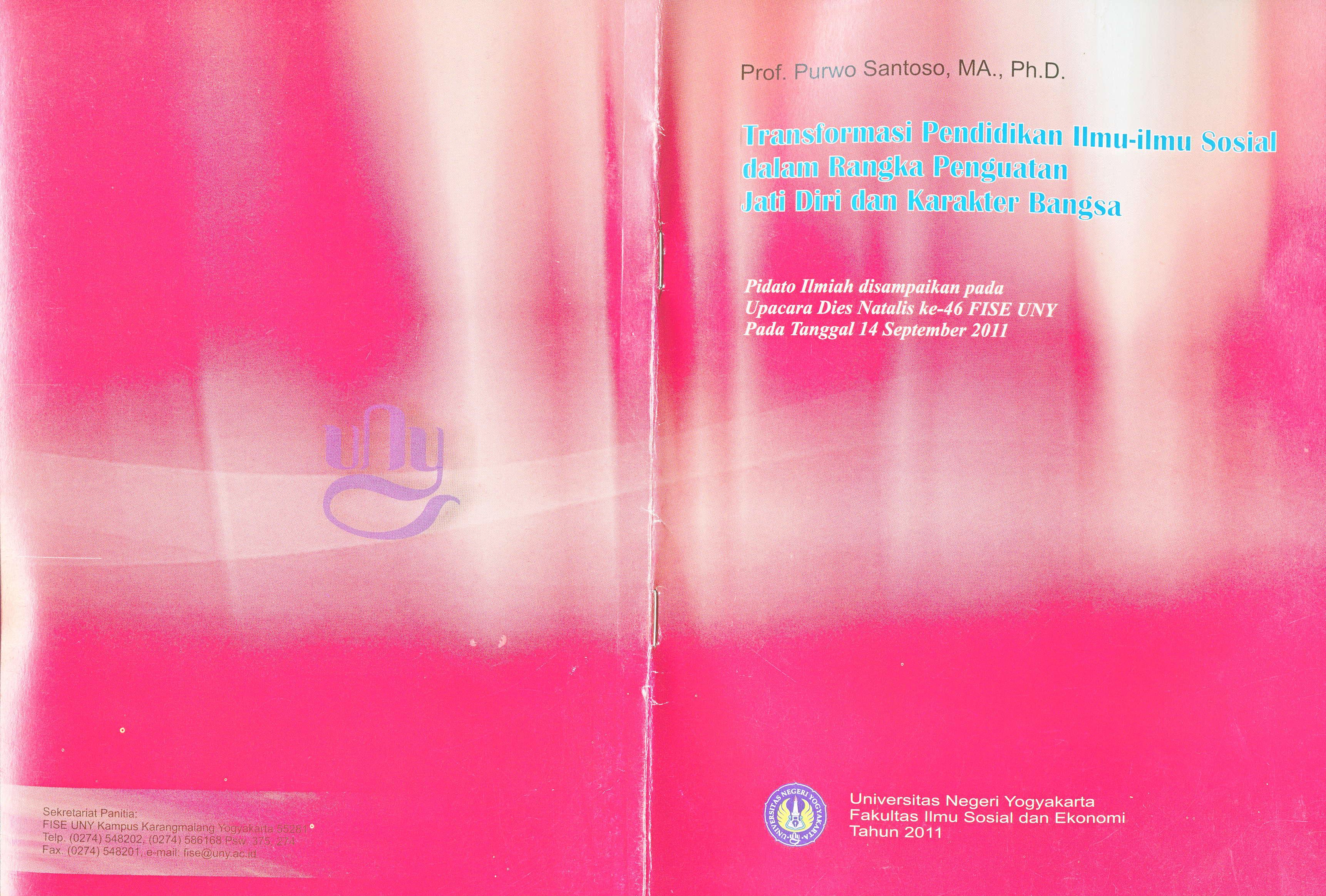
***dato Ilmiah disampaikan pada***

***Upacara Dies Natalis ke-46 FISE UNY Pada Tangga1 14 September 2011***



Sekretariat Panto:

FISE UNY Kampus Karangmalartg Yug Telp (0274) 548202. (0274) 586/68 PS

Fax (0274) 548201, e-mail. fise@uny.a6.1e1

Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Tahun 2011

**Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa   
Melalui Pendidikan Ilmu Sosial Transformatif**

**Prof. Drs. Purwo Santoso, MA., Ph.D.**

**Pidato Ilmiah   
Dies Natalis ke-46   
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi   
Universitas Negeri Yogyakarta   
*14 September 2011***

**Kementerian Pendidikan Nasional   
Universitas Negeri Yogyakarta   
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi   
2011**

Yang terhormat;

Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Rokhmat Wahab, MA.

Bapak Dekan (Bapak Sardiman AM, M.Pd) berikut jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE UNY);

Pimpinan dan anggota Senat FISE UNY;

Para Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan FISE, UNY;

*Civitas Academica* FISE UNY,

Hadirin, tamu undangan yang saya muliakan;

***Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuhu!***

***Salam sejahtera buat kita semua !***

Segala puji dan ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di rungan ini, memperingati hari jadi FISE UNY. Hanya dengan petunjukNya pula kita bisa menekuni dunia keilmuan; khususnya dunia pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan ini, pertama-tama ijinkanlah saya menyampaikan selamat ulang tahun FISE yang ke-46 kepada pimpininan dan *civitas academica* FISE UNY. Semoga semakin berjaya dan semakin kontributif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya perlu saya sampaikan kepada pimpinan FISE UNY, yang memberikan kesempatan kepada diri saya untuk berdiri di mimbar yang prestisius ini, dalam forum yang sangat penting ini. Semoga melalui perbincangan kita kali ini, FISE UNY berhasil memancangkan tonggak kemajuan dan pengembangan dirinya.

**MERESPON PERMASALAHAN BERBASIS JATI DIRI**

***Hadirin yang saya muliakan;***

Topik yang diamanatkan untuk kita perbincangkan sepertinya (maaf-maaf) agak *klise:* yakni 'jati diri bangsa' dan 'karakter bangsa'. Telah terlalu sering, bahkan dengan nada *sok,* kita membahas persoalan ini. Ironisnya, kemajuan atau perubahan yang kita capai ya begitu-begitu juga. Tidaklah pada tempatnya kalau peringatan *dies natalis* FISE UNY ini kita gunakan untuk, dalam bahasa pasaran, *sok-sok-an.*Yangkiranya justru menarik untuk dibahas adalah kecenderungan untuk *sok-sok-an;* tepatnya *sok* nasionalistik.

Ketika suatu universitas, dimintai kontribusinya dalam penanganan masalah bangsa atau kebangsaan, yang biasa disodorkan adalah serangkaian gagasan. Kemasan gagasan itu bisa bermacam-macam, makalah seminar, naskah akademik, konsep kebijakan, *grand design* dan sebagainya. Materi pidato, jangan lupa adalah salah satu kemasan yang bisa disodorkan. Agar tidak ikut *sok-sok-an,* pidato ini tidak bermaksud untuk menawarkan resep khusus untuk mengatasai masalah jati diri dan karakter bangsa tersebut. Kalaulah kedua hal ini nantinya dibahas, pembahasannya tidak dari awal diniati untuk secara khusus menjawab persoalan khusus itu.

Konsep-konsep yang ditawarkan oleh universitas tidak jarang juga dilecehkan publik.Celoteh ejekan itu misalnya: "Teorinya *sih* begitu, tapi prakteknya *kan* lain." Terhadap ejekan yang ada ini, para konseptor dari kampus banyak yang tidak berkutik. Cukup alasan bagi kita untuk mawas diri, karena jangan-jangan secara keilmuan kita inipun sedang terbelit masalah serius. Oleh karena itu, tidak perlulah kita *sok* hebat, seolah apa yang kita katakan rekomendasikan tidak problematik.

Kesempatan memperingati *dies natalis* FISE UNY kali ini hendak saya manfaatkan untuk melakukan refleksi tentang yang selama ini terjadi sehingga kapasitas kita mengawal perubahan nasib bangsa begitu terbatasnya. Yang hendak kita refleksikan secara kritis adalah aktualisasi jatidiri kita, yakni universitas (khususnya fakultas) sebagai lembaga pendidikan dan universitas sebagai lembaga keilmuan. Ada dua hal yang menjadi *core business* universitas: (1) pendidikan, dan (2) pengembangan ilmu.

Tanpa kesediaan untuk melakukan refleksi kritis terhadap kedua hal ini, keterlibatan kita dalam menangani masalah jati diri dan karakter bangsa niscaya akan selalu terjebak dalam pola yang selama ini, yakni menawarkan jawaban *klise.* Kalaulah pada gilirannya nanti kita punya usulan tentang penguatan jati diri dan karakter bangsa, itu dilakukan demi aktualisasinya sebagai lembaga pendidikan dan keilmuan, bukan karena ambisi untuk tampil hebat sebagai pejuang kebangsaan.

Buru-buru perlu ditegaskan bahwa, dalam pidato ini sama sekali tidak ada niatan untuk mengingkari kronisnya masalah kebangsaan. Point yang hendak dikedepankan di sini adalah bahwa kalaulah universitas, dalam hal ini FISE UNY, hendak berkotribusi terhadap bangsanya, bentuk kontribusi yang paling utama adalah yang berangkat dari jati diri dan karakternya sendiri. Dalam keyakinan saya, kontribusi yang diada-adakan tidak akan berumur panjang. Padahal persoalan jati din dan karakter bangsa mengharuskan wawasan lintas generasi. *Point* pentingnya adalah bahwa, jati diri bangsa terbentuk ketika kita sebagai warga bangsa ini, sama-sama bersungguh-sungguh dalam merumuskan dan menegakkan jati diri kita masing-masing. Kalau perilaku kita *sok-sok-an,* kiranya mustahil kita bisa menegakkan jati diri dan karakter bangsa.

Ada dua pertanyaan, yang untuk jawabannya, universitas perlu mereflektif jati dirinya. *Pertama,* sebagai lembaga pendidikan, sejauhmana universitas ambil bagian dari perubahan sosial. *Kedua,* sebagai lembaga keilmuan corak keilmuan macam yang dikembangkan sehingga perannya dalam perubahan sosial melekat dalam kesehariannya.

Kalau dalam kesehariannya universitas memang terlibat jauh dan efektif dalam mengarungi perubahan sosial, maka kontribusinya bagi penyelesaian masalah kebangsaan tidaklah harus "diada-adakan" misalnya dengan membentuk panitia seminar, panitia pidato ilmiah atau panitia apapun. Idealnya, kontribusinya ya melalui kiprahnya sehari-hari. Kalau corak keilmuan yang dikembangkan adalah yang berwatak transformatif, maka aktivitas pengembangan ilmu yang dilakukan dalam kesehariannya akan berkontribusi bagi penanganan masalah bangsa dan kebangsaan.

Setelah mendudukan persoalan seperti ini, saya baru berani menyebutkan bahwa, judul dari pidato ini adalah **Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu Sosial Transformatif.** Yangterlebih dahulu harus didudukkan urgensinya adalah pendidikan ilmu sosial transformatif. Apakah itu? Mengapa harus begitu? Bagaimana mewujudkannya? Kalau semua pertanyaan ini telah terjawab, maka persoalan jati diri dan karakter bangsa hanyalah sebagian kecil dari hal yang bisa dilakukan.

**ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF.**

*Hadirin yang saya muliakan !*

Buru-buru harus saya sampaikan bahwa, ide tentang ilmu sosial transformatif berikut urgensi pengembangannya di universitas-universitas di negeri ini, ini sudah saya sampaikan dalam pidato pengukuhan diri saya sebagai guru besar di UGM bulan Juni 2011 lalu. Ada keperluan bagi saya untuk mengemukakan sejumlah hal. Mohon maaf kalau ternyata saya mengulang-ulang terlalu banyak. Penyampaian ulang ini saya lakukan semata-mata agar alur argumentasi dapat dimengerti kebulatannya.

Gagasan tentang ilmu sosial transformatif saya usulnya setelah memperhatikan bahwa pendidikan yang kita selenggarakan selama ini, sepertinyalebih banyak menghasilkan orang-orang pandai mendiskripsikan permasalah dan kesalahan, dari pada orang-orang yang efektif mengarahkan dan dan ambil bagian dalam mengusung perubahan sosial. Kalaulah perubahan sosial kita kaji, biasanya kita memperlakukannya sebagai perubahan sosial 'mereka', buka perubahan 'kita'sebagai kolektivitas. Kita memposisikan did di luar realita yang kita bahas, demi memastikan kajian kita obyektif.

Ijinkan saya menggunakan ilustrasi di tempat saya mengabdi diri, tepatnya di Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM. Di sana, kami memberi nilai mata kuliah 'demokrasi' bukan dari 'perilakunya dalam berdemokrasi' atau dari 'kontribusinya dalam demokratisasi di negeri ini. Nilai 'A', 'B', 'C' atau 'D" kita berikan dari setelah mengukur kemampuan mengerjakan teka-teki (asah otak), mengerjakan soal-soal ujian. Demokrasi kami analisis sebagai realita pemerintahan "di luar sana", dan kami (baik dosen maupun mahasiswa) menyikapinya secara netral. Demokrasi kami perlakukan sebagai hajat 'orang lain' bukan 'hajat kita bersama'.

Mereka yang dalam transkrip ijazahnya kami beri nilai-nilai 'A'adalah yang begitu fasih menelanjangi praktek demokrasi di negeri ini. Mereka tidak kita uji dari ketahanannya untuk tidak larut dalam pragmatisme, dari kesanggupannya bersikap demokratis dalam situasi yang tidak ideal. Sejauh ini kami belum berhasil membawa mahasiswa ke dalam sutuasi riel yang sarat dengan dillema, dan belum sanggup kami membekali mereka agar *survive* berdemokrasi dalam siatuasi-situasi dilema dilematis yang senantiasa menghadang proses demokratisasi. Karena itulah, kami tidak secara emosional tidak boleh mengeluh kalau demokratisasi tidak segera terwujud, karena secara keilmuan kita tidak menggagendakannya. Proses keilmuan yang berlangsung tidak bersangkut paut dengan proses demokratisasi itu sendiri.

Setelah merefleksi apa yang sehari-hari kita lakukan ini, kami sadar akan adanya hal yang kita sudah *taken for granted,* namun sepertinya tidak masuk akal. Kalau kita tidak pernah "masuk" ke dalam realita yang kita bahas, atas dasar apa kita bisa mengusulkan perubahan? Kegiatan pendidikan dan keilmuan harus transformatif.

Agar ilmu politik berwatak transformatif, kami sebagai bagian dari komunitas ilmuwan politik dituntut untuk membangun sistem pendidikan yang *buid-in* dengan proses transformasi sosial.Kami tidak lagi boleh berfikir bahwa pendidikan adalah satu hal, dan transformasi sosial adalah hal lain. Mengapa ? Kalau demikian halnya maka ilmu sosial sebetulnya tidak memiliki peran langsung dalam memfasilitasi perubahan sosial, termasuk memfasilitasi penguatan jati did dan karakter bangsa. Tidak ada basis moral bagi ilmuwan sosial untuk mengaku-aku sebagai agen perubahan sosial.

Dalam kasus perkuliahan tentang demokrasi tersebut di atas, watak transformatif ilmunya terlihat dari kesadaran bahwa kehidupan politik yang senyatanya tidak demokratis.Justru adanya masalah ketidakdemokratisan itulah yang menjadi titik awali bagi proses pendidikan dan pengembangan ilmu. Akibatnya, pembelajaran demokrasi tidaklah sebatas mencari tahu 'apa itu' demokrasi, melainkan pergulatan nyata dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, materi pembelajaran yang paling penting adalah dilema-dilema yang mengedepan dalam setiap proses demokratisasi, dan acuan-acuan praktis yang masuk akal untuk memastikan demokrasi manifest dalam perilaku kolektif.

Pendidikan dalam konteks ini adalah proses reproduksi nilai (demokrasi), bukan sekedar reproduksi pengetahuan.Kalaulah pendidikan didedikasikan pada akumulasi pengetahuan, pengetahuan tersebut haruslah menjadi milik bersama. Mengapa demikian ? Demokrasi hanya bisa diwujudkan dalam kebersamaan fihak­fihak yang terkait.

Dalam bingkai pemikitan ilmu sosial transformatif, tidak terlalu urgen bagi para ilmuwan untuk merumuskan secara sepihak apakah nilai-nilai yang harus direproduksi. Justru nilai-nilai tersebut harus digali dari kebersamaan, dari relasi sosial dimana ilmuwan terlibat. Yang diperlukan bukan asa spesifikasi nilai, melainkan konsensus dan komitmen tentang nilai. Ilmu sosial transformatif mengharuskan ilmuwan bekerja dan berfikir secara emansipatoris. Ilmuwan ikut membakukan nilai-nilai apa saja yang direproduksi.

Ilmu sosial perlu dihayati sebagai ilmu 'tentang kita', dan produksi pengetahuan melalui kegiatan keilmuan haruslah menambah pengatahuan kita. *Sense* ke-kita-an haruslah manifes dalam kegiatan keilmuan. Ketika meneliti Indonesia, yang harus dilakukan adalah melakukan refleksi kolektif tentang kita sebagai warga bangsa. Agar bersifat transformatif, ilmu sosial perlu memprioritaskan pengkajian tentang 'kita' dari pada mereka. Olah rasa kekitaan itulah yang memungkinkan ilmu sosial ambil bagian dalam proses perubahan sosial dan penanganan masalah kebangsaan.

Tanpa komitmen untuk ambil bagian dalam proses perubahan sosial, ilmu yang kita kembangkan hanya akan mengungkapapa yang seharusnya *(das sollen).* Oleh karena itu, sejauh ini sangat sedikit prestasi kita dalam mewujudkakannya keberpihakan pada nilai ini ke dalam dunia nyata. Kita mendudukkan pendidikan sebagai proses yang apolitis. Apalagi yang dituntut untuk dihasilkan para ilmuwan adalah 'penjelasan ilmiah', bukan 'realita baru' yang didambakan.

Ketiadaan motif untuk melakukan transformasi menjadikan ilmuwan berwatak mendua. Di satu sisi, mereka menekuni dunia pendidikan dan berfikir seakan-akan dapat diisolasi sebagai persoalan teknikalitas pembelajaran.Di sisi lain, dirinya tampil optimis, seakan-akan teknikalitas pembelajaran ini akan bermuara pada perubahan sosial politik.

Ilmu yang kita kembangkan adalah ilmu yang informatif, namun tidak transformatif. Ilmuwan sudah merasa cukup dengan memberi informasi berbasis kajian ilmiahnya, namun tidak berkewajiban untuk menghasilkan perubahan. Lebih dari itu, metodologi keilmuan yang kita berlakukan mengekang kita untuk ambil bagian dalam menghasilkan perubahan. Pengekangan itu kita lakukan demi obyektifitas ataupun kenetralan kajian.

Gagasan tentang pendidikan sebagai reproduksi nilai, sudah lama dikenal dan sudah banyak diperjuangkan. Kealphaan kita selama ini sebetulnya hanya pada level operasionalisasi atau penjabaran. Tidak banyak lembaga pendidikan semacam FISE UNY ini, yang dengan seksama dan komprehensif menjabarkannya. Belum cukup seksama kita menjabarkan gagasan sederhana tersebut ke dalam praktek pengelolaan universitas, praktek pengembangan kurikulum, praktek pembelajaran di kelas, praktek ekstra kurikuler maupun ko-kurikuler. Sederetan - agenda reorientasi masih diperlukan jika suatu universitas betul-betul hendak menjadi katalisator, kalau bukan faktor penentu, perubahan sosial.

Untuk menunjukkan proses dan arah reorientasi secara sederhana, man kita renungkan rutinitas kita dalam produksi karya ilmiah mandiri yang disebut skripsi (untuk S-1), thesis (untuk S-2) dan desertasi (untuk S-3). Seberapa jauh penulisan skripsi, thesis dan desertasi telah kita kaitkan dengan penanganan permasalahan­permasalahan bangsa?

Apa *sih* permasalahan yang dikaji: masalah keilmuan (masalah keilmuan) ataukah masalah sosial (masalah yang membebani masyarakat). Sepanjang yang saya ketahui, sebagian besar masalah yang dicanangkan dalam rumusan masalah skripsi/thesis/desertasi adalah masalahnya ilmuwan. Kalaulah masalah ilmuwan tersebut terjawab, tidak dengan serta-merta masalahnya masyarakat tidak terjawab. Penulisan ketiga jenis karya ilmiah yang menandai derajat kesarjaan insan akademis ini tidak didasari pada obsesi untuk unjuk kemampuan menghasilkan realitas baru, melainkan "sekedar" menawarkan penjelasan baru. Penilaian baik-buruknya karya ilmiah inipun bukan didasarkan pada kokoh­lemahnya komitmen pada nilai tertentu, melainkan pada masuk akal tidaknya penjelasan yang diberikan. Sangat jarang skripsi, thesis dan desertasi tersebut yang menginformasikan keberhasilan insan akademik dalam mewujudkan realitas sosial baru yang kita dambakan.

|  |  |
| --- | --- |
| *Point* yang hendak dikedepankan di sini adalah bahwa, kalau dari cara kernya universitas memang tidak pernah mencanangkan perannya sebagai pencipta realitas sosial baru maka tidaklah semestinya dia berpretensi, apalagi berjanji untuk itu. Pretensi kita untuk dapat meneguhkan jati diri dan karakter bangsa, harus kita waspadai sendiri. | …. kalau dari cara kerjanya universitas memang tidak pernah mencanangkan perannya sebagai pencipta realitas sosial baru maka tidaklah semestinya dia berpretensi, apalagi berjanji untuk itu. Pretensi kita untuk dapat meneguhkan jati did dan karakter bangsa, harus kita waspadai sendiri |

Praktek yang sebaliknya, justru semakin tidak bisa ditutup-tutupi. Banyak program studi berikut dosen-dosennya tidak sanggup mengawal mahasiswanya untuk menyusun karya ilmiah mandiri (baik skripsi, thesis maupun desertasi) yang secara benar. Dalam kondisi seperti ini, kontribusi karya-karya tersebut bagi pengembangan ilmu dan penanganan masalah sosial kiranya sangat terbatas. Dalam banyak kasus, penulisan skripsi, thesis dan desertasi hanyalah basa-basi akademis. Tidak tertutup kemungkinan, karya ilmiah yang dihasilkan para dosennya pun diselipi berisi-basa basi. Yang menarik karya-karya bernuansa "basa-basi" ini banyak yang lobos sensor dan mendapatkan imbalan yang menggiurkan berkat skema sertifikasi dosen.

Karena penulisan karya-karya ilmiah mandiri ini didudukkan kebagai kewajiban (syarat untuk memperoleh gelar akademik), maka maraklah pasar gelap penulisan skripsi, thesis dan desertasi. Saya tidak menyetujui pasar gelap tersebut, namun adanya pasar gelas itu sendiri adalah pertanda gagalnyakita menegakkan kaidah keilmuan: mandiri dan jujur dalam menghasilkan karya. Kegagalan menegakkan etika penulisan skripsi, thesis dan desertasi ini harus dibaca sebagai bentuk kontribusi negatif kalangan universitas dalam menguatkan jati diri dan karakter bangsa. Kontibusi negatif universitas ini harus dihitung secara seksama karena karena efeknya begitu siginifikan, menyusup ke lapis elit yang secara sistemik, mempengaruhi nasib bangsa secara keseluruhan. Kalau menghasilkan lulusan yang jujur secara keilmuan saja kedodoran, atas dasar apa universitas bisa menjadi sandaran bangsa ini dalam meneguhkan jati diri dan karakter kolektif kita sebagai bangsa?

Pertanyaannya sekarang, apakah FISE UNY tertarik dengan gagasan pendidikan dan corak pengembangan ilmu yang transformatif ?

Tidaklah mungkin saya memaksakan gagasan yang, sejauh ini belum lazim. Apalagi saat ini universitas lebih memilih untuk memposisikan diri sebagai pelaku industri, menyelenggarakan pendidikan sekedar untuk menyediakan sumber daya manusia yang dipesan kalangan industri. Kalau universitas memposisikan diri sebagai *suplier* tenaga kerja, maka tawaran saya tentulah tidak menarik. Hanya saja, kita sebagai insan akademik tidak memiliki basis untuk mengatakan siap untuk ambil bagian dalam megususung perubahan sosial, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang teguh dengan jati dirinya, dan percaya diri dengan karakternya dan sebagainya. Artinya, apa yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini, pada dasarnya adalah basa-basi juga !

Jika FISE UNY benar-benar mengembangkan pendidikan yang transformatif, dan ilmu sosial yang digeluti semakin hari semakin transformatif, maka ada begitu banyak masalah kolektif (kebangsaan) yang langsung atau tidak langsung akan ikut ditanggulangi. Untuk itu, FISE UNY harus memiliki politik keilmuan. FISE UNY tidak hanya mengembangkan *citra(branding)* sebagai lembaga pendidikan dan keilmuan yang transformatif, namun juga memiliki haluan yang jelas dalam menyikapi berbagai perubahan sosial yang terjadi. Artinya, (1) harus ada nila-nilai tertentu yang disepakati untuk diproduksi, dan (2) ukuran keberhasilan pendidikan di FISE UNY adalah tereproduksinya nilai-nilai tersebut dalam kiprah sehari-harinya.Senat akademik, kiranya adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk merumuskan komitmen politik untuk mereproduksi nilai-nilai ini. Jajaran pimpinan Fakultas, dalam konteks ini adalah eksekutor bertanggung jawab untuk menjabarkan rumusan tersebut ke dalam langkah-langkah managerial.

**STRATEGI KEBUDAYAAN**

*Hadirin yang cendekia !*

Telah saya sebutkan di atas bahwa pendidikan, dalam bingkai pemikiran ilmu sosial transformatif, adalah proses reproduksi nilai-nilai. Lebih dari itu, nilai kebangsaan adalah hal yang niscaya dijunjung tinggi, mengingat kebangsaan adalah salah satu ekspresi kebersaamaan (ke-kita-an) yang niscaya berlangsung. Komitmen untuk mengembangkan ilmu sosial transformatif, akan bermuara pada pengembangaan kebersamaan dalam berbangsa. Dengan cara ini, sekali lagi, keterlibatan kita dalam pengembangan rasa kebangsaan bukanlah sekedar karena tuntutan politik yang ditujukan kepada diri kita, melainkan karena tuntutan kelembagaan kita sebagai *civitas academics* yang bertekat untuk transformatif secara keilmuan.

Dengan pernyataan tersebut di atas, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu secara khusus merumuskan kebijakan pendidikan karakter. Saya pun sangat setuju dengan gagasan tim Kementerian Pendidikan Nasional untuk perumusangrand *design* pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter pada dasarnya adalah persoalan pembudayaan dan pemberdayaan. Proses pendidikan untuk itu melibatkan berbagai bentuk intervensi dan habituasi. Hanya saja, saya perlu ingatkan bahwa *grand design* itu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Manakala proses pendidikan tidak berwatak transformatif, maka masih tersisa teka-teki sederhana namun vital: Bagaimana konsepnya para pakar bertansformasi menjadi proses perubahan yang membudaya. Dalam implementasi *disain* itu, tersisa pertanyaan: siapa *men-disain* siapa ! Siapa menciptakan kebiasaan buat siapa !

Sebelum mengomentari tentang isi atau materi pendidikan karakter yang dimuat dalam dari *grand design,* saya tergelitik untuk mengomentari popuparitas konsep *grand design* itu sendiri. Terminiologi *grand design,* menurut hemat saya, mengisyaratkan optimisme yang berlebihan, kalau bukan watak *sok.* Ada dua fihak yang sulit menyadari potensi dirinya untuk *sok.* Pertama, para ahli atau konseptor. Dalam kenaifannya, mereka begitu gagah berani menjanjikan perubahan sesuai dengan spesifikasi langkah yang dirumuskannya. Mereka berani mempertaruhkan nama besarnya untuk menghasilkan resep perubahan yang menjanjikan. Kedua, pemerintah atau pemegang otoritas pendidikan.Dengan kenaifannya mereka begitu optimis bahwa penggunaan otoritas yang dimiliki akan dipatuhi dan menjamin tercapainya perubahan yang dirumuskan oleh para pakar tadi.

Pengembangan jati diri dan karakter bangsa mensyaratkan adanya strategi kebudayaan—apalagi seperti telah saya singgung tadi—proses perubahan untuk itu dimaknai sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan. Saya bisa mengikuti jalan fikiran dari para konseptor *grand design,* bahwa intervensi pemerintah dalam proses pembelajaran akan menghasilkan perubahan mikro di tingkat sekolah. Perubahan dalam Skala kecil dibayangkan akan terjadi di setiap sekolah, dan implementasi *design* yang dirumuskan akan memiliki efek berantai dan meluas. Melalui efek berantai dan meluas itulah perumus *grand design* pendidikan bermaksud mentransformasi jati did dan karakter kita sebagai bangsa. Penggunaan konsep *grand design* justru membuat kita lengah bahwa setiap inisiatif untuk berubah akan dijinakkan oleh *status quo.* Optimisme yang ditaburkan bertolak belakang dengan studi-studi yang telah dilakukan, yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari *soft-state* (negara lembek), kalau bukan *weak-state,* karena ketidakmampuannya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya sendiri.

Saya setuju sekali dengan agenda pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar dan mengajar di setiap mata pelajaran di kelas. Saya setuju dengan target atau ambisinya bahwa setiap sekolah adalah wahana untuk menempa jati diri dan karakter.

Yang jelas, untuk mewujudkan hal itu perlu adanya ketekunan dalam merajut perubahan sosial *(social crafting).* Yang diperlukan dalam *crafting* bukan hanya pemahaman akan disain yang dirumuskan oleh para ahli, melainkan juga pemahaman yang mendalam dan akurat akan situasi spesifik di setiap kelas. Dalam kaitan ini, saya tidak yakin para ahli akan cukup tekun untuk melakukannya. Saya juga tidak yakin, para birokrat pendidikan akan cukup seksama memastikan setiap sekolah menjadi ajang yang bisa diandalkan untuk menempaan jati diri dan karakter bangsa.Point tersebut di atas saya perlu saya utarakan sama sekali bukan untuk menggembosi kebijakan pemerintah. Justru sebaliknya ! Saya mengajak untuk mengantisipasi kondisi tersulit justru karena khawatir akan gagal dalam mengawal perubahan budaya.

Mari kita renungkan *point* teoritik berikut ini. Sesuatu disebut sebagai kebudayaan ketika sesuatu itu tidak mudah diubah. Kekuatan budaya ada pada kekedapannya terhadap perubahan. Sesuatu yang telah membudaya, adalah sesuatu yang sulit berubah, dan yang menjadikannya sulit berubah adalah karena para pelaku yang terkait tidak lagi mempersoalkan nilai-nilai yang menjadi acuan perilaku kolektifnya. lni berarti bahwa untuk melansir perubahan budaya, perlu ada provokator yang dari waktu ke waktu mengusik ketidaksadaran yang merutin. Saya tidak yakin para guru kelas maupun para kepala sekolah memiliki kesiapan untuk berperan sebagai provokator, yang meskipun tidak secara linierketerlibatnya secara riel dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan sangatlah penting.

Dalam kesempatan ini, ijinkan saya untuk berandai-andai. Beban para perumus *grand disain* dan pemerintah kiranya tidak akan terlampau berat sekiranya pendidikan transformatif telah membudaya, telah menjadi reek kita dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu. Berdasar pengandaian ini ijinkan saya mengusulkan langkah antara. Pengembangan jati diri dan karakter bangsa kita jadikan sebagai eksperimen untuk pengembangan pendidikan yang berwatak transformatif, dan pada saat yang sama, cara kita menggeluti persoalan kebangsaan ini dengan mengadopsi perspektif ilmu sosial transformatif.

*Pertama,* sebagai proses reproduksi nilai, pendidikan harus bermuara pada **lahirnya pemimpin baru.** Pemimpin yang dimaksudkan adalah yang, sedikit banyak, menjadi personifikasi nilai yang dijunjung tinggi. Jelasnya, nilai-nilai yang secara generik dirumuskan oleh para pakar, hanya bisa ditegakkan di lapangan dalam "bahasa" lapangan. Para pemimpin inilah yang diharapkan menjadi sandaran untuk menegakkan nilai-nilai dalam bahasa orang lapangan yang dimengerti betul oleh para pemimpin. Efek berantai dan meluas yang didambakan oleh para perumus *grand design* tadi tidak akan berlangsung secara mulus, dan para pemimpin yang dibesarkan kondisi lapangan inilah yang bisa diharapkan menjadi pengawalnya.

Sekali lagi, kesungguhan kita dalam mereproduksi nilai-nilai bisa dan perlu ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Manakala nilai-nilai yang kita usung tidak atau kurang populer, maim sangatlah diperlukan adalah personifikasi nilai-nilai tersebut. Merekalah yang bisa diandalkan untuk mengadvokasikannya. Personifikasi nilai-nilai hadir dalam kiprah dan dorongan pemimpin. Dengan kata lain, agar pendidikan berlangsung secara transformatif, proses pendidikan ini ditantang untuk melahirkan para pemimpinpin (produk dari proses pendidikan tersebut) yang gigih mengusung nilai-nilai yang bersangkutan. Keberhasilan proses pendidikan yang berwatak transformatif ditandai oleh lahirnya para pemimpin yang menjadi pembela mati-matian dari nilai-nilai tadi.

Bagaimana merancang pendidikan tinggi yang transformatif ? Ini adalah pertanyaan besar, yang tidak mungkin saya usulkan rumusannya secara tuntas dalam kesempatan ini.

Yang jelas, proses pembelajaran yang ditempuh tidak mungkin hanya mengandalkan kegiatan kurikuler. Proses pendidikan justru harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada sinergi yang optimal antara kegiatan kurikuler, ko­kurikuler dan ektra-kurikuler. Asah dan penempaan kepemimpinan mahasiswa haruslah menjadi visi pembelajaran di universitas. Adanya mata kuliah yang secara eksplisit berjudul kepemimpinan, saya kira, tidak menjadi keharusan. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya komunitas keilmuan yang dipertemukan oleh nilai-nilai tertentu. Orang FISE UNY, saya yakin benar, lebih faham persoalan ini dari pada saya.

Kalaulah ada keharusan untuk menyebut nilai, ada satu yang perlu saya tegaskan:

yakni kejujuran. Pilar dari dunia keilmuan adalah kebenaran'. Apapun isi karya ilmiah kita, yang kita pertaruhkan adalah kebenarannya. Apalah artinya karya ilmiah dan perubahan sosial yang kita hasilkan kalau tidak dibangun di atas kejujuran.Apalah artinya kita mengajarkan jati diri dan karakter kalu yang kita tunjukkan kepada orang lain adalah edisi palsu. Kemampuan untuk memerangkan perang terhadap plagiarisme indikasi minimal bagi keberhasilan mereproduksi.

*Kedua,* pendidikan transformatif -tidak terbayangkan untuk berkembang midsetpengelolaan universitas sebagai kegiatan industri. Yang kita harapkan, pendidikan transformatif mengandaikan universitas adalah medium—aktivisme politik. Mahasiswa yang diidealkan adalah yang aktif secara politik. Pendidikan transformatif tidak mudah ditumbuhkan jika cara kita membayangkan pengelolaan perguruan tinggi terjebak dalam nalar idustrial, mengelola input menjadi *output* dan bermuara pada *outcome.* Pendekatan khas industrial yang linear untuk menghasilkan *outcome* ini, menurut hemat saya, tidak kondusif untuk melahirkan orang-orang yang digerakkan nilai-nilai kebangsaan.

Jelasnya, pendidikan transformative menghendaki perguruan tinggi tetap diposisikan sebagai wadah aktualisasi kebangsaan. Proses pembelajaran resmi, justru diharapkan menyerap spirit gerakan ke dalam kegiatan kurikuler.

Evolusi sekolah anti korupsi di UGM, mungkin bisa menjadi ilustrasi. Para aktivis mahasiswa yang geram dengan maraknya praktek korupsi mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan serangkaian training. Paket training ini mereka sebut Sekolah Anti Korupsi. Inisiatif yang tadinya diambil di tingkat universitas akhirnya terproduksi menjadi kegiatan di tingkat fakultas. Lebih dari itu, sejumlah mata kuliah justru menjadikan paketpelatihan ini sebagai pembelajaran di kelas. Hal ini bisa terjadi ketika aktivisme mahasiswa terpancang dalam gelombang dan frekuensi yang sama dengan kegelisahan sejumlah dosen. Kakunya manajemen pendidikan yang terpasung oleh logika industri bisa menjadi ancaman bagi aktualisasi kampus sebagai medium gerakan kebangsaan: gerakan anti korupsi. Ketersediaan para aktifis anti korupsi ini pada gilirannya akan memaksa para pengelola universitas untuk lebih berhati-hati, lebih jauh terhindar dari gogaan korupsi. Untuk itu, kreativitas birokrat pendidikan menjadi taruhan.

*Ketiga,* pembelajaran transformative mengharuskan kita mengekspose mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan sosial. *Civitas academica* justru belajar bersama untuk mengelami permasalahan riel, dan dengan berbekal teori dan metode melibatkan diri untuk ambil bagian dalam *problem solving.* Melalui melibatan diri *(engagement) inilahtransformative learning* dikelola.

**PENUTUP**

*Hadirin yang berbahagia !*

Ilmu-ilmu sosial yang selama ini dikembangkan di universitas, sangat sedikit yang disiapkan untuk menghasilkan realitas baru. Muara dari pengembangan ilmu sosial bukanlah realitas sosial baru, melainkan sekedar penjelasan yang teruji kebenarannya. Ilmuwan sosial, karena alasan metodologis, justru dilarang untuk bersimpati dengan realitas tertentu. Simpati dan keberpihakannya pada realitas tertentu, menjadikan kajiannya tidak memenuhi standar ilmiah: tidak obyektif. Ketika ilmu-ilmu sosial merasa selesai dengan memberikan penjelasan, dan paling banter adalah prediksi, maka ilmu sosial yang bersangkutan sebetulnya belum sampai pada penciptaan realitas baru. Dalan konteks ini, universitas niscaya canggung dalam menawarkan solusi bagi permasalahan bangsanya. Universitas yang memaksakan diri, berpotensi menghasilkan solusi yang *klise* atau *sok.*

Gagasan tentang ilmu sosial transformatif yang telah saya sampaikan, insyaAllah berpotensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Repotnya, ada prasyarat yang tidak sedikit dan pelaksanaan *yangnjlimet.* Betapa bahagianya diri saya jika, sebagian, kalaulah tidak keseluruhan, ide yang saya kemukakan dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan universitas sebagai lembaga pendidikan dan lembaga keilmuan. Dalam kesempatan ini saya memberanikan diri untuk menjanjikan *iming-iming* bahwa dengan mengembangkan pembelajaran dan Ilmu sosial transformative ada banyak masalah kebangsaan yang bisa kita atasi melalui kiprah sehari-hari. Peneguh jati diri dan karakter bangsa, ‘hanyalah’ salah satu efek samping yang bisa diwujudkan.

Semoga FISE UNY tetap jaya. Semoga FISE UNY semakin transformatif demi Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai khilaf dalam penyampaian gagasan ini.

*Wassalamu alaykum warahmatullaahi* ***wabarakaatuh !***

**Catatan:**

1Purwo Santoso, "Ilmu Sosial Transformatif', pidato pengukuhan Guru Besar, Universitas Gadjah Mada, 19 Juni 2011.